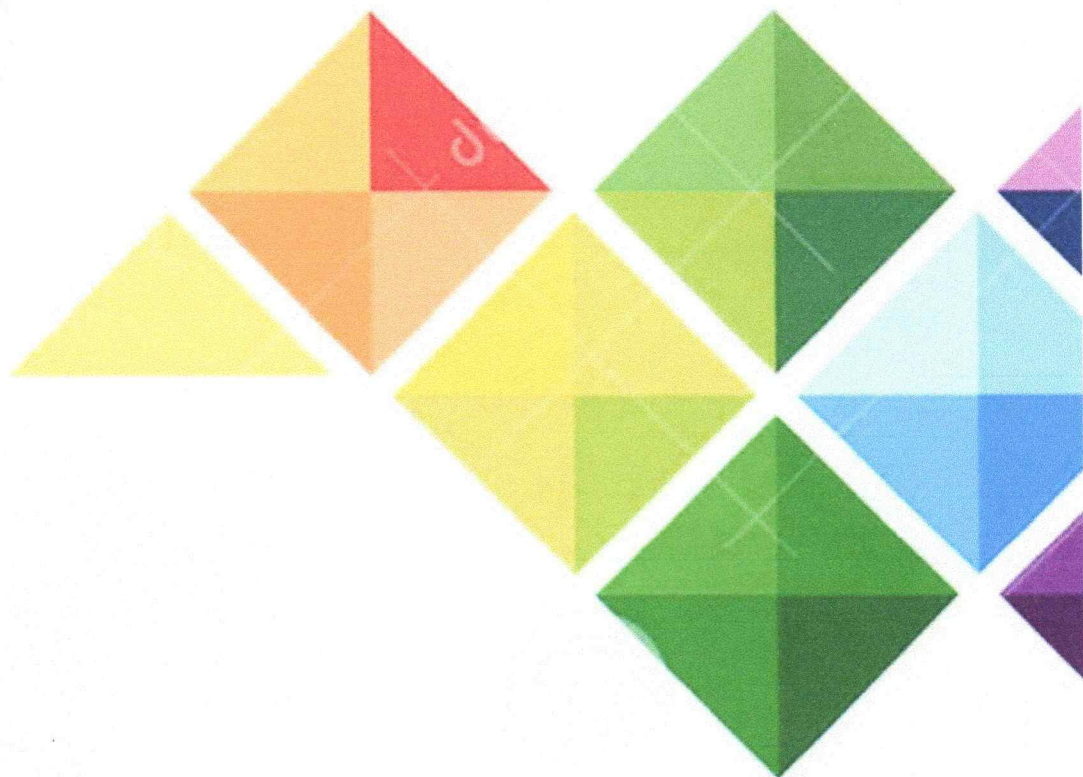




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG

**TAHUN 2019**

---



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan bimbingan-Nya yang diberikan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan kepada masyarakat selama tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib serta memberikan manfaat terhadap masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang selalu berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabel dan peningkatan pelayanan publik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun setiap tahun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi, khususnya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan laporan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016–2021. LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019 menggunakan dasar Penetapan Kinerja (PK) sebagai dasar tolok ukur penilaian kinerja. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya nanti terdapat beberapa perubahan, maka akan dilakukan beberapa penyesuaian berdasarkan pada Perubahan Anggaran tahun berikutnya.

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019. Semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Sintang, Februari 2020

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sintang



dr. HARYSINTO LINO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710722 200012 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum.....	1
A. Kabupaten Sintang .....	1
B. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang .....	2
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.....	8
1. Visi .....	8
2. Misi.....	8
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	9
B. Perjanjian Kinerja .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
1. Meningkatnya Derajat Kesehatan yang Optimal .....	18
2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat .....	21
3. Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat .....	22
4. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Miskin.....	23
5. Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan .....	23
6. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	24
B. Realisasi Anggaran .....	26
BAB IV PENUTUP.....	33
A. Kesimpulan .....	33
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	33
LAMPIRAN .....	33

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sintang terdapat dalam Misi ke-2 (dua) yaitu Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat. Langkah yang ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Sarana dan Prasarana Aparatur, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, implementasi pencegahan penyakit menular, standar pelayanan bidang kesehatan, implementasi pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan di setiap desa, pelayanan kesehatan lansia, koordinasi pengawasan dan pengendalian makanan serta meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Untuk tercapainya langkah – langkah tersebut maka pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai macam kegiatan strategis yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sintang maupun APBN. Seluruh kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan 2019, dimana target-targetnya telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) berikut penyesuaiannya setelah Perubahan APBD Tahun 2019.

Berdasarkan penilaian sendiri terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja adalah **149,85** atau dikategorikan **Sangat Baik**.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

#### **A. Kabupaten Sintang**

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur, ibu kota berada di Sintang, terletak di antara 0°05' Lintang Utara dan 0°46' Lintang Selatan serta 110°50' Bujur Timur dan 113°20' Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 21.635 km<sup>2</sup> (2,16 juta hektar), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan : berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi dan Ketapang.
- Timur : berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau.

Jumlah penduduk sebanyak 418.840 jiwa (proyeksi tahun 2018), dengan kepadatan rata-rata 608,04 jiwa/km<sup>2</sup>. Komposisinya terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas dari suku Dayak dan Melayu. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah petani karet dan sawit.

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat 4 (empat) Bukit yang cukup tinggi, yaitu: Bukit Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Bukit Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Bukit Batu Baluran (tinggi 1.556 m) dan Bukit Batu Sambung (tinggi 1.770 m) di Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 391 desa. Kecamatan terdiri atas : Ambalau (terluas 6.386,40 Km<sup>2</sup> atau 29,52% dari luas wilayah Kabupaten Sintang), Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang (terkecil 277,05 Km<sup>2</sup> atau 1,28% dari luas Kabupaten Sintang). Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan dengan Malaysia.

Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Sintang, seperti gambar 1.1 dibawah ini :

**Grafik 1.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Sintang**



Sumber : BPS Kab. Sintang 2018

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km<sup>2</sup> atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km<sup>2</sup>). Tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah *latosol* seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten), tanah *podsolik* seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah *alluvial* seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah *organosol* seluas 45.056 hektar (2,08%).

## B. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

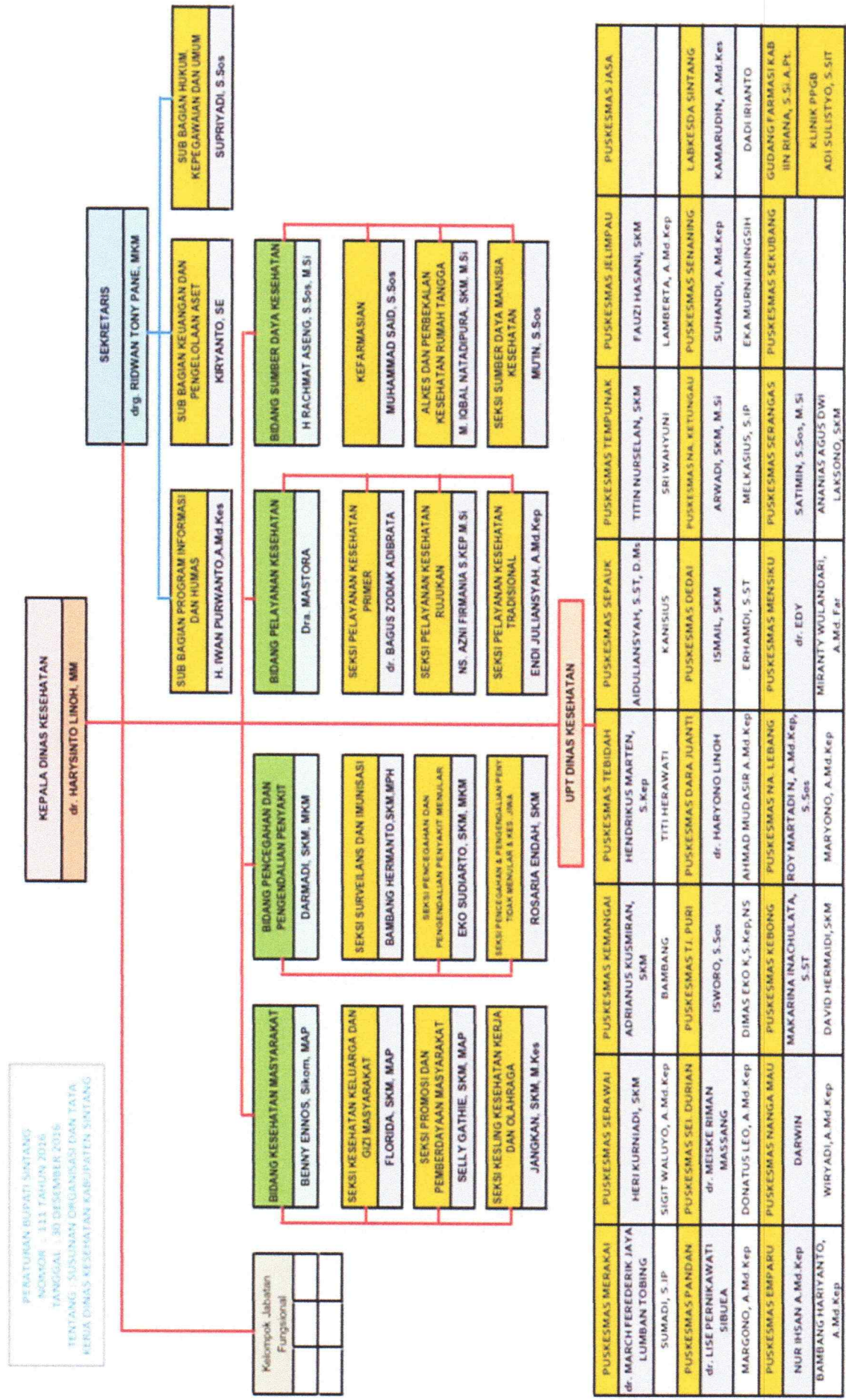
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kesehatan;
- c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. Pembinaan dan penempatan tenaga fungsional kesehatan;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan;
- f. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional;
- g. Pelaksanaan dan pengawasan kerjasama di bidang kesehatan;
- h. Pelaksanaan dan pembinaan masyarakat di bidang kesehatan;
- i. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang kesehatan;
- j. Pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan kepada masyarakat;
- k. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan perencanaan teknis di bidang Kesehatan;
- l. Pembinaan UPTD di bidang kesehatan;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kesehatan;
- n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan;
- o. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibidang kesehatan;
- q. Penyusunan penetapan kinerja di bidang kesehatan;
- r. Penyusunan analisa jabatan;
- s. Penyusunan pengawasan melekat;
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
  - 2) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat ;
  - 3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
  - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kefarmasian;
  - 2) Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga;
  - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
  - 1) Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
  - 2) Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah);
  - 3) PPGGB (Pusat Penatalaksanaan Gizi Buruk);
  - 4) UPOPPKD (Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Daerah).

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang**



Kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan fungsional kesehatan, yaitu :
  - 1) Dokter
  - 2) Dokter Gigi
  - 3) Apoteker
  - 4) Asisten Apoteker
  - 5) Perawat
  - 6) Perawat Gigi
  - 7) Bidan
  - 8) Pranata Laboratorium Kesehatan
  - 9) Entomolog Kesehatan
  - 10) Epidemiolog Kesehatan
  - 11) Sanitarian
  - 12) Penyuluh Kesehatan Masyarakat
  - 13) Administrator Kesehatan
  - 14) Nutrisionis
  - 15) Psikolog Klinis
  
- b. Jabatan fungsional non-kesehatan, yaitu :
  - 1) Arsiparis
  - 2) Pranata Komputer
  - 3) Analis Kepegawaian
  - 4) Pranata Humas

## **B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)**

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat antara lain :

1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Usia harapan hidup bertambah setiap tahunnya tetapi lambat.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih kurang, baik kuantitas maupun kualitas.
3. Ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter, jumlahnya masih kurang untuk melayani penduduk.
4. Kematian Ibu (AKI) masih tinggi.
5. Prevalensi Gizi Buruk dan **Stunting**
6. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah.
7. Trend peningkatan kasus gangguan jiwa

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen induk dalam rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Sintang 5 (lima) tahun kedepan. Dalam konteks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 memuat sasaran strategis, tujuan, strategi dan kebijakan.

##### **1. Visi**

Visi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021".

##### **2. Misi**

Misi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2016-2021 :

- a. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- b. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- c. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- d. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- e. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- f. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sintang terdapat dalam Misi ke-2 (dua) yaitu Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat. Langkah yang ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Meningkatkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
- d. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
- e. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat
- g. Meningkatkan pengembangan lingkungan sehat
- h. Meningkatkan implementasi pencegahan penyakit menular
- i. Meningkatkan standar pelayanan bidang kesehatan
- j. Meningkatkan implementasi pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin
- k. Meningkatkan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan di setiap desa
- l. Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia
- m. koordinasi pengawasan dan pengendalian makanan
- n. keselamatan ibu melahirkan dan anak

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama**

Tujuan pembangunan kesehatan, yaitu terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten Sintang guna peningkatan kualitas kesehatan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan bidang kesehatan jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 seperti tercantum dalam tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal	Meningkatnya derajat kesehatan yang optimal	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan
Meningkatkan status gizi masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan gizi masyarakat	Perbaikan gizi Masyarakat
Meningkatkan upaya kesehatan bersumber masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan bersumber masyarakat	Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan	Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan bagi masyarakat miskin	Peningkatan layanan kesehatan penduduk miskin
Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan	Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan		Pengadaan tenaga Kesehatan
Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan		Peningkatkan sarana dan prasarana kesehatan

## **B. Perjanjian Kinerja**

Untuk mengukur capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang 2016-2021 telah disusun Perjanjian Kinerja mengenai target capaian kinerja pada tahun

2019 dengan Program prioritas serta anggaran yang tersedia, seperti yang terdapat pada tabel 2.2 dibawah ini :



**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya derajat kesehatan yang optimal	1. Angka Usia Harapan Hidup	71,95 Tahun
		2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup	976 per 1000 KH
		3. Cakupan komplikasi kebidanan Yang ditangani	81,82 %
		4. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,50 %
		5. Cakupan Desa/Kelurahan <b>Universal Child Immunization</b> (UCI)	93,04 %
		6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	80,02 %
		7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100 %
		8. Cakupan Kunjungan Bayi	85,80 %
2.	Meningkatnya status gizi masyarakat	9. Persentase Balita Gizi Buruk	2,32 %
		10. Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	100 %
3.	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	11. Rasio Posyandu	1,15 per 100 Balita
4.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	25,55 %
5.	Meningkatnya ketersediaan Tenaga Kesehatan	13. Rasio dokter	24,81 per 100 ribu pddk
		14. Rasio paramedis (perawat dan bidan)	197,03 per 100 ribu pddk
6.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	15. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk	21,69 per 100 ribu pddk
		16. Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,09 per 100 ribu pddk
		17. Cakupan Puskesmas	2,78 %
		18. Cakupan Puskesmas Pembantu	76,28 %
		19. Peningkatan SDM Kesehatan :	
		a. Persentase Registrasi SDM	83,33 %
b. Persentase Sertifikasi SDM	56,67 %		
c. Persentase Lisensi SDM	68,33 %		

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan anggaran (program dan kegiatan) tahun 2019, yang merupakan komitmen kinerja antara Bupati Sintang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Jumlah anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2019, seperti yang tertera pada tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Anggaran**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2019**

	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	KET
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>Rp 57.677.395.099,68</b>	
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>Rp 117.670.986.255,23</b>	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 18.491.902.100,00	
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 9.987.704.898,00	
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp 349.471.000,00	
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 300.000.000,00	
5	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 10.657.791.250,00	
6	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 27.281.939.575,00	
7	Pengawasan Obat dan Makanan	357.959.700,00	
8	Pengembangan Obat Asli Indonesia	Rp 107.345.900,00	
9	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rp 573.370.650,00	
10	Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 1.462.922.200,00	
11	Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 763.521.967,00	
12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 1.669.134.800,00	
13	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 1.149.938.000,00	
14	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp 17.235.413.000,00	
15	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rp 1.426.940.000,00	
16	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Rp 68.835.000,00	
17	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp 3.785.258.000,00	
18	Badan Layanan Umum Daerah	Rp 19.761.378.590,23	
19	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Rp 556.045.200,00	
20	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Rp 1.312.950.000,00	
21	Peringatan hari nasional dan daerah	Rp 371.164.425,00	
<b>TOTAL I+II</b>		<b>175.348.381.354,91</b>	

**Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, 2019**

Alokasi yang terbesar untuk pembiayaan kesehatan pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebanyak Rp.27.281.939.575,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada 2 (dua) macam :

- o Jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka gunakan rumus pendek.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- o Jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata rata.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja dari BPKP sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : kurang
- Nilai > 55 s/d 70 : cukup
- Nilai > 70 s/d 90 : baik
- Nilai > 90 s/d 100 : sangat baik

Secara substantif Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dalam jangka menengah (Renstra) adalah tercapainya misi-misi jangka menengah Dinas Kesehatan sedangkan dalam jangka pendek adalah tercapainya sasaran-sasaran jangka pendek sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019. Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat disajikan berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis, pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang**  
**Tahun 2019**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Meningkatnya derajat kesehatan yang optimal	1. Angka Usia Harapan Hidup	71,95 Thn	71,62	99,54
	2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup	976 per 1000 KH	990	101,4
	3. Cakupan komplikasi kebidanan Yang ditangani	81,82 %	47,07	57,53
	4. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,50 %	81,97	87,67
	5. Cakupan Desa/ Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	93,04 %	85,01	91,37
	6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	80,02 %	45,37	56,70
	7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100 %	100	100
	8. Cakupan Kunjungan Bayi	85,80 %	86,77	101,13
Meningkatnya status gizi masyarakat	9. Persentase Balita Gizi Buruk	2,32 %	0,26	188,79
	10. Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	100%	100	100
Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	11. Rasio Posyandu	1,15 per 100 Balita	1,57	136,52
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	25,55%	77,49	303,29
Meningkatnya ketersediaan Tenaga Kesehatan	13. Rasio dokter	24,81 per 100 ribu pddk	19,23	77,51
	14. Rasio paramedis (perawat dan bidan)	197,03 per 100 ribu pddk	210,36	106,77
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	15. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk	21,69 per 100 ribu pddk	92,52	426,54
	16. Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,09 per 100 ribu pddk	0,97	88,99
	17. Cakupan Puskesmas	62,78%	35,25	56,14
	18. Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu, Poskesdes, Polindes)	76,28%	34,79	45,61
	19. Peningkatan SDM Kesehatan : a. Persentase Registrasi SDM b. Persentase Sertifikasi SDM c. Persentase Lisensi SDM	83,33 % 56,67 % 68,33 %	22,69 6,80 100	27,23 12,00 146,35

**Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, 2019**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2019, ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Dalam rangka mencapai target kinerja, upaya yang dilakukan berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan tingkat capaian yang bervariasi dari setiap Indikator Kinerja .

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis berdasarkan target Indikator Kinerja tahun 2019, sebagai berikut :

### **1. Meningkatnya Derajat Kesehatan yang Optimal**

a. Angka Usia Harapan Hidup;

Realisasi Umur Harapan Hidup : 71,62 tahun, dengan tingkat capaian 99,54 % (target 71,95 tahun).

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB);

Realisasi Angka Kelangsungan Hidup Bayi sebesar 990 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) dengan tingkat capaian 101,04 % (target 976 per 1000 KH).

c. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;

Intervensi untuk menurunkan angka kematian ibu salah satunya adalah penanganan komplikasi kebidanan. Realisasi sebesar 47,07 % (target 81,82 %). Capaian kinerja sebesar 57,53 %.

d. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan angka kematian ibu. Realisasi sebesar 81,97 % (target 95,50 %). Capaian kinerja sebesar 87,67 %.

e. Cakupan Desa / Kelurahan *Universal Child Immunization* ( UCI );

Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100 % desa/Kelurahan. Dari 407 desa/kelurahan yang ada, realisasi sebesar 85,01 % (target sebesar 93,04 %). Capaian kinerja sebesar 91,37 %. Hal ini perlu peningkatan kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

f. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+);

Realisasi penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) sebesar 45,37 % dengan tingkat capaian kinerja 56,70 % dari target yang ditetapkan (target 80,02 %). Perlu peningkatan kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD;

Realisasi penemuan dan penanganan penderita DBD sebesar 100 % dengan tingkat capaian kinerja 100 % dari target yang ditetapkan (target 100 %).

h. Cakupan Kunjungan Bayi;

Realisasi Cakupan kunjungan bayi sebesar 86,77 % dengan tingkat capaian kinerja 101,13 % dari target yang ditetapkan (target 85,80 %).

Berdasarkan capaian dari 8 (delapan) indikator kinerja pertama, tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencapai **86.92 %**.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Umur Harapan Hidup masih mengikuti data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, dikarenakan untuk menentukan umur harapan hidup



diperlukan data jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang.

2) Komplikasi kebidanan yang tidak tertangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

3) Masih ada pertolongan persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

4) Hambatan dalam mendorong masyarakat di pedalaman untuk sadar akan pentingnya imunisasi, sehingga pada saat jadwal imunisasi bersedia untuk datang ke tempat pelayanan.

5) Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) target ditetapkan 80,02 % dengan realisasi 45,37 % dan capaian kinerja sebesar 56,70 %. Sehingga diperlukan intervensi baru untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai pedoman program TB untuk hasil yang lebih baik. Keberhasilan program TB di pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain komitmen politis dan pendanaan, Pelayanan TB yang kurang maksimal (kurang dapat diakses oleh masyarakat, diagnosis dan panduan obat, obat tidak terjamin persediaannya, monitoring dan evaluasi yang kurang baik).

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan pemanfaatan layanan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), Peningkatan kemitraan bidan dan dukun (advokasi pada pengambil kebijakan), peningkatan supervisi fasilitatif ke puskesmas dan surveilans KIA, Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kabupaten dan peningkatan kapasitas petugas di lapangan untuk AMP yang ditujukan untuk mencari penyebab kematian pada ibu, bayi dan anak balita dalam upaya mengatasi penyebab kematian tersebut.

2) Pemantapan sistem rujukan kasus emergensi pada ibu dan neonatal serta meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar, agar mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara berjenjang dari unit pelayanan dasar (Polindes, Poskesdes) sampai ke tingkat lanjut (RS).

3) **Sweeping** imunisasi di desa-desa yang belum tercapai target imunisasinya/**Universal Child of Immunization** (UCI), kerjasama lintas program dan lintas sektoral, mengatasi hambatan dalam pelaksanaan imunisasi, mempunyai data sasaran yang akurat. Pemegang program sebaiknya melakukan analisis penilaian pencapaian cakupan sebagai bentuk evaluasi.

4) Bimbingan teknis pada pengelola TB-paru puskesmas dan penjangkaran suspek penderita TB-paru. Memperkuat sistem kesehatan, melibatkan pemberi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, pemberdayaan masyarakat.

5) Meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan peran dan pemanfaatan posyandu, penyuluhan kesehatan/promosi kesehatan kepada masyarakat terutama ibu yang memiliki anak bayi dan balita untuk memanfaatkan pelayanan di posyandu serta menggalang kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan berbagai pembinaan posyandu seperti fasilitasi pelayanan posyandu, monitoring dan evaluasi pelayanan posyandu.

## **2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat**

### **a. Persentase Balita Gizi Buruk;**

Berdasarkan data yang dilaporkan jumlah gizi buruk tahun 2019 sebanyak 36 orang. Dengan jumlah balita ditimbang sebanyak 13.681 orang maka persentase Balita Gizi Buruk adalah 0,26 % (target 2,32 %) dengan capaian kinerja sebesar 188 %. Hal ini menunjukkan kinerja yg lebih baik, karena semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

b. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

Jumlah Balita yang menderita Gizi Buruk sebanyak 36 balita. Seluruh balita tersebut mendapat perawatan yang intensif di PPGB Kabupaten Sintang. Penanganan dalam 3 (tiga) fase yaitu stabilisasi, transisi dan rehabilitasi gizi buruk.

Berdasarkan capaian kinerja dari 2 (dua) indikator status gizi masyarakat, capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencapai **144,40 %**. Upaya mempertahankan pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan upaya pencegahan dengan melakukan pemantauan tumbuh kembang di posyandu serta meningkatkan peran dan pemanfaatan posyandu melalui penyuluhan kesehatan/promosi kesehatan kepada masyarakat terutama ibu yang memiliki anak balita untuk memanfaatkan pelayanan di posyandu dan meningkatkan kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan pembinaan posyandu seperti fasilitasi pelayanan posyandu (variasi penyuluhan misal pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayuran, ternak ayam dan ikan), monitoring dan evaluasi pelayanan posyandu.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan gizi dalam penanganan balita gizi buruk dilakukan melalui pelatihan penatalaksanaan gizi buruk bagi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada balita gizi buruk dilaksanakan secara berkesinambungan.

### **3. Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat**

#### **a. Rasio Posyandu**

Realisasi Rasio Posyandu sebesar 1,57 dengan tingkat capaian kinerja 136,52 % dari target yang ditetapkan (target 1,15 per 100 Balita).

Berdasarkan capaian dari 1 (satu) indikator kinerja ketiga, tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencapai **136,52 %**.

#### **4. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Miskin**

a. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin;

Penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2019 sebanyak 410.734 jiwa (Disdukcapil Kabupaten Sintang, 2019) dan sebanyak 223.328 jiwa dengan kategori penduduk miskin (54,37 %). Pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun 2019 berjumlah 173.059 orang (77,49 %).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pada tahun 2019 mempunyai target cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 (Puskesmas) sebesar 25,55 %. Realisasi cakupan sebesar 77,49 % sehingga capaian kinerja mencapai 303,29 %. Hal ini disebabkan peningkatan akses pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin, dengan adanya program BPJS (PBI) dan Jamkesda yang berkaitan dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan di sarana kesehatan strata pertama (Puskesmas).

Berdasarkan indikator kinerja Pelayanan Masyarakat Miskin, tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencapai **303,29 %**.

#### **5. Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan**

a. Rasio Dokter

Jumlah Dokter di Kabupaten Sintang sebanyak 79 orang (termasuk Dokter Umum, Spesialis dan Dokter Gigi) dan Jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 410.734 Jiwa pada tahun 2019.

Rasio Dokter di Kabupaten Sintang per 100.000 penduduk yaitu 19,23 (target 24,81) dengan capaian kinerja sebesar 77,51 %.

b. Rasio Paramedis (Perawat dan Bidan)

Jumlah Paramedis (Perawat dan Bidan) di Kabupaten Sintang sebanyak 864 orang dan Jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 410.734 Jiwa pada tahun 2019.

Rasio Paramedis (Perawat dan Bidan) di Kabupaten Sintang per 100.000 penduduk yaitu 210,36 (target 197,03) dengan capaian kinerja sebesar 106,77 %.

Berdasarkan capaian kinerja Indikator Ketersediaan Tenaga Kesehatan, tingkat capaian kinerja mencapai 92,14 %.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Masih kurangnya profesi dokter di Kabupaten Sintang.

Upaya mengantisipasi hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong pengadaan Dokter untuk mencapai Rasio Dokter 24,81 per 100.000 penduduk.
- 2) Meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk Pendidikan Dokter dalam pemenuhan kebutuhan tenaga profesi Dokter di Kabupaten Sintang.

## **6. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan**

a. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk;

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Sintang sebanyak 20 buah, Poliklinik (Polindes dan Poskesdes) sebanyak 274 buah dan Puskesmas Pembantu sebanyak 120 buah. Jadi Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per 100.000 penduduk adalah 92,52 dengan capaian kinerja 426,54 % (target 21,69).

b. Rasio Rumah Sakit per 100.00 penduduk;

Jumlah RS di Kabupaten Sintang ada 4 (tiga) yaitu RSUD Ade Muhammad Djoen, RS Tk. IV (Pratama) dan RS Asyiffa (Swasta) dan RSKIA Bujang Dara,

dengan jumlah penduduk 410.734 jiwa. Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk adalah 0,97 dengan capaian kinerja 88,99 % (target 1,09).

c. Cakupan Puskesmas

Jumlah kunjungan di puskesmas sebanyak 144.768 pada tahun 2019. Jadi Realisasi Cakupan Puskesmas sebesar 35,25 % dengan Capaian Kinerja sebesar 56,14 % dari target yang ditetapkan (62,78 %).

d. Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu, Poskesdes, Polindes)

Jumlah kunjungan di puskesmas pembantu sebanyak 142.885 pada tahun 2019. Jadi Realisasi Cakupan Puskesmas sebesar 34,79 % dengan Capaian Kinerja sebesar 45,61 % dari target yang ditetapkan (76,28 %).

e. Peningkatan SDM Kesehatan

Realisasi Persentase Registrasi SDM sebesar 22,69 % dengan Capaian Kinerja sebesar 27,23 % dari target yang ditetapkan (83,33 %). Realisasi Persentase Sertifikasi SDM sebesar 6,80 % dengan Capaian Kinerja sebesar 12,00 % dari target yang ditetapkan (56,67 %). Realisasi Persentase Lisensi SDM sebesar 100 % dengan Capaian Kinerja sebesar 146,35 % dari target yang ditetapkan (68,33 %). Capaian Kinerja Indikator Peningkatan SDM Kesehatan sebesar 61,86 %. Capaian indikator Peningkatan SDM Kesehatan sebesar 61,86 %.

Berdasarkan capaian kinerja Indikator Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dari 5 (lima) indikator kinerja sebesar **135,83 %**.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Rumah Sakit Rujukan sudah berfungsi untuk Pelayanan Rawat Jalan, sedangkan Rawat Inap masih menggunakan gedung RSUD yang lama.

- 2) Masih kurangnya RS di Kabupaten Sintang, untuk pendirian RS perlu **Cost** dan Sumber Daya yang besar.
- 3) Masih kurangnya Nakes yang mendukung pelayanan kesehatan terutama kunjungan pasien ke Puskesmas dan jaringannya.
- 4) Masih kurang kesadaran SDM Kesehatan dalam melakukan Registrasi SDM di Dinas Kesehatan
- 5) Kurangnya dana untuk melakukan pelatihan sertifikasi terhadap SDM Kesehatan

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan status Rumah Sakit Ade Muhammad Djoen dari tipe C menjadi tipe B sesuai dengan pedoman dan standar teknis.
- 2) Mendorong pertumbuhan RS untuk mencapai Rasio Rumah Sakit 1,09 per 100.000 penduduk.
- 3) Mendorong pengadaan Nakes sesuai rencana kebutuhan Nakes di Puskesmas dan Jaringannya.
- 4) Sosialisasi terhadap lulusan Sekolah Tinggi dan Perguruan Tinggi Kesehatan di Kabupaten Sintang untuk melakukan Registrasi SDM Kesehatan Di Dinas Kesehatan.
- 5) Advokasi pendam untuk kegiatan pelatihan (sertifikasi) Nakes di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pencapaian kinerja anggaran sebesar 94,56 %. Realisasi anggaran pelaksanaan progam/kegiatan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sesuai dengan Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Tahun 2018, seperti yang tergambar pada tabel 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang**  
**Tahun Anggaran 2019**

	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 57.677.395.099,68	Rp. 57.319.383.255,00	99,38
B.	BELANJA LANGSUNG	Rp.117.670.986.255,23	Rp. 108.482.700.552,36	92,19
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 18.491.902.100,00	Rp. 17.488.463.746,00	94,57
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 9.987.704.898,00	Rp. 8.123.125.813,00	81,33
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 349.471.000,00	Rp. 330.477.290,00	94,57
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 300.000.000,00	Rp. 278.837.732,00	92,95
5	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 10.657.791.250,00	Rp. 10.298.793.697,00	96,63
6	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 27.281.939.575,00	Rp. 25.977.438.860,00	95,22
7	Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 357.959.700,00	Rp. 331.791.252,00	92,69
8	Pengembangan Obat Asli Indonesia	Rp. 107.345.900,00	Rp. 93.791.100,00	87,37
9	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rp. 573.370.650,00	Rp. 545.902.383,00	95,21
10	Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 1.462.922.200,00	Rp. 1.440.268.668,00	98,45
11	Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 763.521.967,00	Rp. 699.306.556,00	91,59
12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 1.669.134.800,00	Rp. 1.278.806.822,00	76,61
13	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 1.149.938.000,00	Rp. 881.254.839,00	76,63
14	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp. 17.235.413.000,00	Rp. 16.573.067.906,00	96,16
15	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rp. 1.426.940.000,00	Rp. 1.412.638.400,00	99,00
16	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Rp. 68.835.000,00	Rp. 32.764.000,00	47,60
17	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp. 3.785.258.000,00	Rp. 2.306.443.016,00	60,93
18	Badan Layanan Umum Daerah	Rp. 19.761.378.590,23	Rp. 18.219.338.972,36	92,20
19	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Rp. 556.045.200,00	Rp. 508.416.500,00	91,43
20	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 1.312.950.000,00	Rp. 1.308.855.000,00	99,69
21	Peringatan hari nasional dan daerah	Rp. 371.164.425,00	Rp. 352.918.000,00	95,08
	TOTAL I + II	Rp. 175.348.381.354,91	Rp. 65.802.083.807,36	94,56



Realisasi anggaran terbesar pada Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu 99,69 % dan realisasi anggaran terkecil pada Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan yaitu 47,60%.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran, maka dapat disimpulkan bahwa **pencapaian kinerja** Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pada Tahun 2019 mencapai nilai **149,85** atau dikategorikan **Sangat Baik**.

Nilai Capaian Kinerja tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata pencapaian Indikator dengan menggunakan rumus :

$$\text{Nilai Capaian Kinerja} = \frac{\sum \text{Nilai Sasaran Strategis}}{\sum \text{Sasaran Strategis}}$$

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan yang Optimal	86,92
2.	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	144,40
3.	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	136,52
4.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	303,29
5.	Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan	92,14
6.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	135,83
	<b>Total</b>	<b>149,85</b>

### B. Strategi Peningkatan Kinerja

Ukuran capaian kinerja pada dasarnya adalah perbandingan antara target dan realisasi. Kebijakan dan sasaran pada tahun-tahun mendatang tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra 2016-2021). Peningkatan kinerja dapat diperoleh dengan menjalankan beberapa komponen :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas sebagai aktor utama pembangunan bidang kesehatan.
2. Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam penyelesaian berbagai permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat.
3. Peningkatan dukungan dan peran aktif masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pelayanan kesehatan.
4. Perbaikan atau penyempurnaan berbagai kebijakan, tatalaksana dan perangkat OPD.

Mengawali periode Rencana Strategis (Renstra 2016-2021), adalah waktu yang tepat untuk membenahi landasan operasional periode berikutnya. Landasan operasional dimaksud utamanya adalah :

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kesehatan baik pada tingkat dinas kesehatan sampai pada tingkat puskesmas. Rencana kerja dan indikator kinerjanya harus disusun lebih baik dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan riil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan sebagai institusi yang melayani kesehatan masyarakat. Indikator kinerja harus tersusun secara jelas, relevan serta terukur.
2. Data kinerja yang selama ini banyak terkendala memerlukan suatu mekanisme pengumpulan dan pemantauan secara intensif.
3. Integrasi dan sinkronisasi kebijakan mulai dari pusat hingga ke daerah kabupaten/kota, sehingga menuntut ditingkatkannya intensitas pembinaan baik pembinaan secara organisasional maupun personal.

Selain itu beberapa permasalahan/tantangan yang muncul, sebagai berikut :

- Tuntutan masyarakat akan pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu serta peningkatan profesionalisme aparatur yang lebih akuntabel, mesti ditindaklanjuti dan disikapi dengan disusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang berisi Pelayanan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan merujuk pada upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan dan optimalisasi penggunaan teknologi.

- Penanganan berbagai permasalahan kesehatan yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan umum.
- Peningkatan pencapaian indikator kinerja SPM bidang kesehatan.
- Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara, terutama masyarakat miskin agar mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.
- Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan, bencana alam dan kejadian luar biasa (wabah) penyakit membutuhkan kesiagaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam dan wabah penyakit.
- Kerjasama lintas sektoral antar kelompok masyarakat (adat dan budaya) tokoh agama dan pemerintah ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dibidang kesehatan.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS KESEHATAN

Jalan Teluk Menyurai, Telp. (0565) 21941 fax. (0565) 22268  
S I N T A N G

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. HARYSINTO LINOH, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.Ph  
Jabatan : Bupati Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

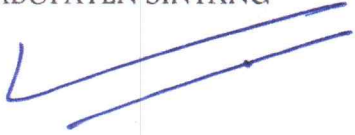
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,  
BUPATI SINTANG

  
dr. H. JAROT WINARNO, M. Med.Ph

Sintang, Maret 2019

Pihak pertama,  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SINTANG

  
dr. HARYSINTO LINOH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197107222000121002

**LAMPIRAN :**

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya derajat kesehatan yang optimal	1. Angka Usia Harapan Hidup	71,95 Thn
		2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup	976 per 1000 KH
		3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	81,82 %
		4. Cakupan Pertolongan Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,50 %
		5. Cakupan Desa/Kelurahan <b>Universal Child Immunization</b> (UCI)	93,04 %
		6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	80,02 %
		7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100 %
		8. Cakupan kunjungan bayi	85,80 %
2.	Meningkatnya status gizi masyarakat	9. Persentase Balita Gizi Buruk	2,32 %
		10. Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	100 %
3.	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	11. Rasio Posyandu	1,15 per 100 balita
4.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	25,55 %
5.	Meningkatnya ketersediaan Tenaga Kesehatan	13. Rasio Dokter	24,81 per 100.000 pddk
		14. Rasio Paramedis	197,03 per 100.000 pddk
6.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	15. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk	21,19 %
		16. Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,01 %
		17. Cakupan Puskesmas	62,78 %
		18. Cakupan Puskesmas Pembantu	76,28 %
		19. Peningkatan SDM Kesehatan	
	a. Persentase Registrasi SDM	83,33 %	
	b. Persentase Sertifikasi SDM	56,67 %	
	c. Persentase Lisensi SDM	68,33 %	

**II ALOKASI ANGGARAN 2019**

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	KET
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>57.677.395.099,68</b>	
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>117.670.986.255,23</b>	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.491.902.100,00	
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9.987.704.898,00	
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	349.471.000,00	
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	300.000.000,00	
5	Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.657.791.250,00	
6	Upaya Kesehatan Masyarakat	27.281.939.575,00	
7	Pengawasan Obat dan Makanan	357.959.700,00	
8	Pengembangan Obat Asli Indonesia	107.345.900,00	
9	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	573.370.650,00	
10	Perbaikan Gizi Masyarakat	1.462.922.200,00	
11	Pengembangan Lingkungan Sehat	763.521.967,00	
12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.669.134.800,00	
13	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.149.938.000,00	
14	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	17.235.413.000,00	
15	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1.426.940.000,00	
16	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	68.835.000,00	
17	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	3.785.258.000,00	
18	Badan Layanan Umum Daerah	19.761.378.590,23	
19	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	556.045.200,00	
20	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1.312.950.000,00	
21	Peringatan hari nasional dan daerah	371.164.425,00	
<b>TOTAL I+II</b>		<b>175.348.381.354,91</b>	

Sintang, Maret 2019

PIHAK KEDUA  
BUPATI SINTANG  
dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PhPIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SINTANG

dr. HARYSINTO LINO, MM

Kepala Muda

NIP. 19710722 200012 1 002





# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KESEHATAN

Jalan Teluk Menyurai, Telp. (0565) 21941 fax. (0565) 22268  
S I N T A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG

- Menimbang :
- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat);
  - b. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
  - c. bahwa agar pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Indikator Kineja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  3. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

- KEDUA : Indikator Kineja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kineja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud diktum kedua sebagai indikator pengukuran kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada tanggal : Juli 2016

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR :**

**TANGGAL :** JULI 2016

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG**

- 1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
- 2. Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Kesehatan
- 3. Fungsi : Pelaksana pembangunan di bidang kesehatan
- 4. Indikator Kinerja Utama : Sasaran strategis bidang kesehatan tahun 2016 - 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya derajat kesehatan yang optimal	1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	Probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun  Perhitungan : AKHB = 1 - AKB 1 = 1.000 kelahiran Contoh : AKB = 2,18 Maka AKHB = 1.000 - 2,18 = 998 (pembulatan tanpa desimal)	per 1.000 Kelahiran Hidup	BPS	SDIK
		2 Angka Usia Harapan Hidup	Angka/ umur perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.  Perhitungan : Jumlah umur kohort / Jumlah kohort	Tahun	BPS	SDIK
		3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan Komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih padatingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK)	%	GKIA	GKIA
		4 Cakupan pertolongan	Perhitungan : (Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jml Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100%  Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga	%	GKIA	GKIA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	<p>kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>Perhitungan : (Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama) x 100%</p>			
5	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	<p>Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana <math>\geq 80\%</math> dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun</p> <p>Perhitungan : <math>\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan UCI}}{\text{Seluruh desa / kelurahan}} \times 100\%</math></p>	%	P2P	P2P
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	<p>Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.</p> <p>Perhitungan : (Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama 1 tahun / Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu 1 tahun) x 100%</p>	%	P2P	P2P
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	<p>Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p>Perhitungan : (Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu 1 tahun / Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu 1 tahun yang sama) x 100%</p>	%	P2P	P2P
8	Cakupan kunjungan bayi	Cakupan kunjungan bayi	<p>Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>Perhitungan : (Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama) x 100%</p>	%	GKIA	GKIA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Status gizi masyarakat	9 Persentase balita gizi buruk 10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	<p>Persentase Balita dengan status gizi buruk di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun</p> <p>Perhitungan : <math>\frac{\text{Jumlah Balita (0 – 59 bulan) Gizi buruk}}{\text{Jumlah seluruh balita yang ditimbang}} \times 100\%</math></p> <p>Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>Perhitungan : <math>\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%</math></p>	%	GKIA	GKIA
3.	Meningkatnya upaya kesehatan bersumber masyarakat	11 Rasio Posyandu	Perbandingan posyandu dengan persatuan jumlah balita. Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Posyandu}}{\text{Jumlah balita}}$	Per 100 Balita	GKIA	GKIA
4.	Meningkatnya pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	<p>Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu</p> <p>Perhitungan : <math>\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di Sarkes strata 1}}{\text{Jumlah seluruh miskin di kab/kota}} \times 100\%</math></p>	%	YANKES	YANKES
5.	Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan	13 Rasio Dokter 14 Rasio Paramedis (Perawat dan Bidan)	<p>Perbandingan Dokter dengan per satuan jumlah penduduk.</p> <p>Perhitungan : <math>\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000 \text{ pddk}</math></p> <p>Perbandingan Paramedis dengan per satuan jumlah penduduk.</p> <p>Perhitungan : <math>\frac{\text{Jumlah Paramedis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000 \text{ pddk}</math></p>	per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk	SDIK	SDIK
6.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	15 Rasio puskesmas, poliklinik, puslu	<p>Perbandingan puskesmas, poliklinik dan puslu persatuan jumlah penduduk</p> <p>Perhitungan : <math>\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik dan puslu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000 \text{ pddk}</math></p>	per 100.000 penduduk	SDIK	SDIK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		16 Rasio Rumah Sakit	Perbandingan rumah sakit persatuan jumlah penduduk Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah rumah sakit} \times 100.000}{\text{jumlah penduduk}}$	per 100.000 penduduk	SDIK	SDIK
		17 Cakupan Puskesmas	Cakupan Puskesmas adalah jumlah kunjungan di puskesmas di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu Perhitungan : $\frac{\text{jumlah kunjungan di puskesmas} \times 100\%}{\text{jumlah penduduk}}$	%	YANKES	YANKES
		18 Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu, Poskesdes, Polindes)	Cakupan pustu, poskesdes, polindes adalah jumlah kunjungan pustu, poskesdes, polindes di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu Perhitungan : $\frac{\text{jumlah kunjungan di pustu, poskesdes, polindes} \times 100\%}{\text{jumlah penduduk}}$	%	YANKES	YANKES
		19 Peningkatan SDM Kesehatan :	a. Persentase Registrasi SDM Persentase Registrasi SDM Kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Registrasi SDM Kesehatan}}{\text{jumlah seluruh SDM Kesehatan}} \times 100\%$ b. Persentase Sertifikasi SDM Persentase Sertifikasi SDM Kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Sertifikasi SDM Kesehatan}}{\text{jumlah seluruh SDM Kesehatan}} \times 100\%$ c. Persentase Lisensi SDM Persentase Lisensi SDM Kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Lisensi SDM Kesehatan}}{\text{jumlah seluruh SDM Kesehatan}} \times 100\%$	%	SDIK	SDIK
				%	SDIK	SDIK
				%	SDIK	SDIK

Sintang, Juli 2016  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

